



**Analisis Kinerja Keuangan Dinas Sosial  
Kota Prabumulih Dengan Variabel Keuangan Dan Non Keuangan**

**Supriadi<sup>1</sup>**  
**Marjohan<sup>2</sup>**

[Supriadiandi292@yahoo.co.id](mailto:Supriadiandi292@yahoo.co.id)  
[marjohan@stie-aprin.ac.id](mailto:marjohan@stie-aprin.ac.id)

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin**

**Article Info**

Kata Kunci :  
*Performance, Financial, Non-  
Financial Performance*

**Abstract**

*This study aims to analyze the financial performance of the Prabumulih City Social Service both from financial and non-financial variables. In this study, the key informants were the leaders and employees of the Prabumulih City Social Service and the people who used the services of the Prabumulih City Social Service. The data analysis technique used is descriptive quantitative.*

*The results showed that the financial performance of the Prabumulih City Social Service Office based on the balance scorecard assessment had all gone well. This can be seen from the financial assessment from 2019-2021. The results of the realization of the Prabumulih City Social Service budget realization activity were very good with the classification of the difference (variant) in the category of profitable difference. Then the non-financial assessment in terms of customer perspective, internal business process perspective and learning and growth perspective are all in good category.*

*It is hoped that the Prabumulih City Social Service will increase accuracy in the preparation of program activities that can be implemented in real terms so that there are no program failures in their implementation in the following years. Then the Social Service of Prabumulih City to pay more attention to the things that cause the difference between budget and realization so that the use of funds can be in accordance with what was budgeted. And in order to further improve financial performance from the non-financial side, it is hoped that the Prabumulih City Social Service will further improve the capabilities of its employees by providing education and training on a regular basis and of course supported by adequate infrastructure.*

**Supriadi<sup>1</sup>**  
**Marjohan<sup>2</sup>**

[Supriadiandi292@yahoo.co.id](mailto:Supriadiandi292@yahoo.co.id)  
[marjohan@stie-aprin.ac.id](mailto:marjohan@stie-aprin.ac.id)

**Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 11.2.2022**

---

## PENDAHULUAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pusdiklat Pengawasan BPKP, 2011).

Kinerja atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004:24). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 20021), yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Perkembangan Pemerintah di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berupa laporan kinerja maupun laporan keuangan.

Kinerja instansi pemerintahan bersifat multidimensional artinya tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat dilakukan melalui pendekatan analisis anggaran, analisis laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian di Kota Prabumulih, dimana setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda dengan daerah lainnya sehubungan dengan pencapaian kinerja keuangannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan Dinas Sosial Kota Prabumulih dengan variabel keuangan dan Non Keuangan”.

### A. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Prabumulih.

### B. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat diukur dan dapat dilakukan perhitungan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi.

Menurut Sugiyono (2017:207) kegiatan dalam analisis data deskriptif kuantitatif adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

#### 2. Definisi Konsep

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara umum meliputi penilaian kinerja keuangan dan non keuangan.

### C. Definisi Operasional

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan**

Dimensi	Indikator	Skala Ukur
Keuangan (Finansial)	1. Realisasi 2. Anggaran	Rasio
Non Keuangan	1. Kepuasan Pelanggan 2. Proses Bisnis Internal 3. Pembelajaran dan Pertumbuhan	Skala Linkert

### D. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian
  - a. Uji Validitas
  - b. Uji Reliabilitas
2. Deskriptif Kuantitatif

### E. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan disini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai principal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah (Eliza Dewi Susanto & Henny Murtini, 2015:3).

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang menjalankan organisasi maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2016).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu organisasi adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat organisasi dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk organisasi itu sendiri dan juga bagi *shareholders* (Putra, 2017).

#### 2. Teori Stakeholder

Teori stakeholder disini menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Eliza Dewi Susanto & Henny Murtini, 2015:3).

Friedman mendefinisikan stakeholder sebagai: “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” yaitu sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Mahdiyyah Haisir, 2017). Stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya (Marzully Nur dan Denies Priantinah, 2012).

### 3. Kinerja Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Ukuran kinerja menjadi dua, yaitu ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan. Kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Di pihak lain, kinerja non keuangan dapat dilihat dari kualitas pelayanan, kedisiplinan, kepuasan pelanggan dan sebagainya.

Kinerja Keuangan Daerah adalah wujud dari bentuk penilaian terhadap pencapaian kegiatan atau serangkaian program suatu organisasi dalam satu periode tertentu di bidang keuangan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran yang sebelumnya telah disepakati bersama (Susilowati, 2016:232).

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur menurut Halim (2017:230):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2012:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

#### 4. Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat intangible output maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk menilai kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu digunakan penilaian kinerja nonfinansial. Berikut ini informasi yang digunakan untuk penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2012:123-124):

##### a. Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial dapat diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Secara garis besar, analisis varians berfokus pada:

- 1) Varians Pendapatan (Revenue Variance)
- 2) Varians Pengeluaran (Expenditure Variance)
- 3) Varians belanja rutin (Recurrent Expenditure Variance)
- 4) Varians belanja investasi/modal (Capital Expenditure Variance)

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusur varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.

#### F. Pengukuran Evaluasi

##### 1. Aspek Implementasi

##### a). Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja

PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\sum_{j=1}^i RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^i RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

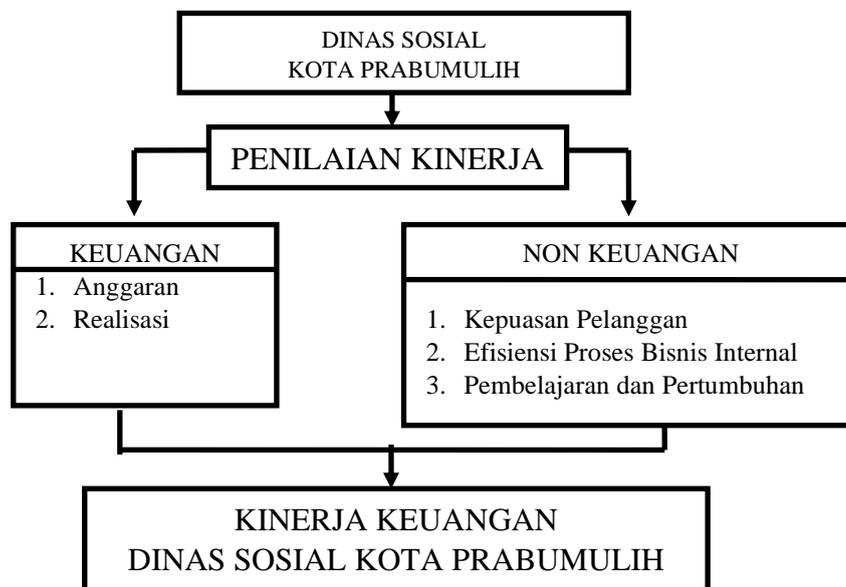
RA : Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja  
 RPD : Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja  
 n : Jumlah bulan

2. Informasi Nonfinansial

Penggunaan analisis varians saja terkadang dianggap belum cukup untuk menilai kinerja karena dalam analisis varians masih terdapat keterbatasan. Untuk menyempurnakan penilaian kinerja maka informasi nonfinansial dapat digunakan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik penilaian kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi yaitu dengan Balanced Scorecard.

**G. Kerangka konseptual penelitian**

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai penelitian ini mengenai analisis kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Prabumulih dapat di lihat pada kerangka pemikiran berikut:



Gambar. 1 Kerangka Konseptual

Mengacu pada gambar 1 bahwa kerangka konseptual penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu fasilitas, tarif, dan pelayanan. Variabel fasilitas dalam penelitian ini ditentukan oleh kebersihan pada ruang tunggu, kelengkapan produk, kelengkapan alat facial, kebersihan dan kenyamanan ruang konsultasi.

Variabel tarif dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kesesuaian tarif yang ditetapkan dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Variabel pelayanan dalam penelitian ini di pengaruhi oleh ketepatan waktu pelayanan, dan keramahan karyawan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Variabel Keuangan**

Penilaian kinerja keuangan Dinas Sosial Kota Prabumulih secara finansial atau keuangan dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 201**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>14.313.970.461</b>	<b>13.906.864.304</b>	<b>407.106.157</b>	<b>97,16</b>
1	Belanja Pegawai	1.395.553.461	1.161.759.604	233.793.857	83,25
2	Belanja Brg & Jasa	11.006.617.000	10.947.087.700	59.529.300	99,46
3	Belanja Hibah	1.911.800.000	1.798.017.000	113.783.000	94,05
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>99,21</b>
	Belanja Modal Peratalan dan Mesin	70.000.000	69.450.000	550.000	99,21
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>14.383.970.461</b>	<b>13.976.314.304</b>	<b>407.656.157</b>	<b>97,17</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Prabumulih (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2019 semua realisasinya tidak ada yang mencapai 100%. Untuk realisasi belanja operasi hanya sebesar 97,16% dimana tingkat pencapaian tertinggi terletak pada realisasi belanja barang dan jasa yaitu sebesar 99,46%. Kemudian untuk realisasi belanja modal mencapai 99,21%. Sehingga secara keseluruhan untuk realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih sebesar 97,17%.

Berdasarkan kategori penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2019 terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil".

Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2019 kesemuanya lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus (S). Kemudian sehubungan dengan konsistensi anggaran terhadap perencanaan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan Tahun 2019**

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Tingkat Penyerapan
Januari	1.050.750.200	1.050.750.200	-	0%
Februari	1.050.750.200	2.101.500.400	450.730.550	21,45
Maret	1.050.750.200	3.152.250.600	1.050.065.075	33,31
April	1.050.750.200	4.203.000.800	1.850.650.720	44,03
Mei	1.050.750.200	5.253.751.000	2.650.751.252	50,45
Juni	1.050.750.200	6.304.501.200	3.960.755.050	62,82
Juli	1.050.750.200	7.355.251.400	6.750.525.253	91,78
Agustus	1.405.743.812	8.760.995.212	7.325.430.225	83,61
September	1.405.743.812	10.166.739.024	9.155.345.512	90,05
Oktober	1.405.743.812	11.572.482.837	10.850.750.615	93,76
November	1.405.743.812	12.978.226.649	12.150.750.922	93,62
Desember	1.405.743.812	14.383.970.461	13.976.314.304	97,17
Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan				64%

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk konsistensi anggaran terhadap perencanaan Dinas Sosial Kota Prabumulih untuk tahun 2019 sebesar 64%.

Berikutnya perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.545.316.677</b>	<b>4.322.982.509</b>	<b>222.334.168</b>	<b>95,11</b>
1	Belanja Pegawai	1.253.273.577	1.087.204.859	166.068.718	86,75
2	Belanja Brg & Jasa	3.268.043.100	3.211.777.650	56.265.450	98,28
3	Belanja Hibah	24.000.000	24.000.000	0	100
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>71.426.000</b>	<b>71.426.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Belanja Modal Peratalan dan Mesin	71.426.000	71.426.000	0	100
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>4.616.742.675</b>	<b>4.394.408.509</b>	<b>222.334.168</b>	<b>95,18</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Prabumulih (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 realisasi yang mencapai 100% hanya untuk anggaran Belanja Modal sedangkan realisasi untuk belanja operasi hanya pada belanja Hibah yang mencapai 100%, sedangkan belanja pegawai, barang dan jasa tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan untuk realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 sebesar 95,18%.

Berdasarkan kategori penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil".

Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 pada belanja modal nilai anggaran sama dengan nilai realisasi, maka disebut impas (I) sedangkan pada belanja operasi nilai anggaran lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus (S).

Secara keseluruhan untuk anggaran Belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 semua nilai anggaran lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus (S).

Kemudian sehubungan dengan konsistensi anggaran terhadap perencanaan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan Tahun 2020**

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Tingkat Penyerapan
Januari	275.215.325	275.215.325	-	0%
Februari	275.215.325	550.430.650	115.005.672	20,89
Maret	275.215.325	825.645.975	205.750.435	24,92
April	275.215.325	1.100.861.300	455.324.505	41,36
Mei	275.215.325	1.376.076.625	775.652.413	56,37
Juni	275.215.325	1.651.291.950	935.677.912	56,66
Juli	275.215.325	1.926.507.275	1.114.502.352	57,85
Agustus	538.047.080	2.464.554.355	1.745.325.422	70,82
September	538.047.080	3.002.601.435	2.067.565.415	68,86
Oktober	538.047.080	3.540.648.515	2.900.670.832	81,92
November	538.047.080	4.078.695.595	3.415.677.894	83,74
Desember	538.047.080	4.616.742.675	4.394.408.509	95,18
<b>Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan</b>				<b>55%</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk konsistensi anggaran terhadap perencanaan Dinas Sosial Kota Prabumulih untuk tahun 2020 sebesar 55%.

Berikutnya perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
<b>A</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>17.094.291.044</b>	<b>16.056.427.633</b>	<b>1.037.863.411</b>	<b>93,93</b>
1	Belanja Pegawai	2.634.639.044	2.276.006.970	358.632.074	86,39
2	Belanja Brg & Jasa	12.411.852.000	11.779.540.663	632.311.337	94,91
3	Belanja Hibah	184.800.000	184.800.000	0	100
4	Belanja Bantuan Sosial	1.863.000.000	1.816.080.000	46.920.000	97,48
<b>B</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>46.966.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>13.466.000</b>	<b>71,33</b>
	Belanja Modal Peratalan dan Mesin	46.966.000	33.500.000	13.466.000	71,33
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>17.141.257.044</b>	<b>16.089.927.633</b>	<b>1.051.329.411</b>	<b>93,87</b>

Sumber: Dinas Sosial Kota Prabumulih (2022)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2021 untuk belanja operasi dan belanja modal realisasinya tidak ada yang mencapai 100%.

Untuk realisasi belanja operasi secara keseluruhan hanya sebesar 93,93% dimana tingkat pencapaian tertinggi terletak pada realisasi belanja hibah mencapai 100%. Kemudian untuk realisasi belanja modal mencapai 71,33%. Sehingga secara keseluruhan untuk realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih sebesar 93,87%.

Berdasarkan kategori penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2021 terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil".

Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2021 kesemuanya lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus (S).

Selanjutnya sehubungan dengan konsistensi anggaran terhadap perencanaan untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan Tahun 2021**

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran	Tingkat Penyerapan
Januari	1.125.832.050	1.125.832.050	-	0%
Februari	1.125.832.050	2.251.664.100	905.678.542	40,22
Maret	1.125.832.050	3.377.496.150	1.150.987.345	34,08
April	1.125.832.050	4.503.328.200	1.943.524.545	43,16
Mei	1.125.832.050	5.629.160.250	2.876.543.292	51,10
Juni	1.125.832.050	6.754.992.300	3.125.763.244	46,27
Juli	1.125.832.050	7.880.824.350	5.788.905.648	73,46
Agustus	1.852.086.539	9.732.910.889	7.321.345.677	75,22
September	1.852.086.539	11.584.997.428	8.900.765.486	76,83
Oktober	1.852.086.539	13.437.083.967	10.987.624.532	81,77
November	1.852.086.539	15.289.170.506	13.679.876.804	89,47
Desember	1.852.086.539	17.141.257.045	16.089.927.633	93,87
Konsistensi Anggaran Terhadap Perencanaan				59%

Berdasarkan tabel di atas diketahui untuk konsistensi anggaran terhadap perencanaan Dinas Sosial Kota Prabumulih untuk tahun 2021 sebesar 59%. Kemudian untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan perkembangan realisasi digunakan analisis trend tahun 2019 – 2021 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8**  
**Analisis Trend Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi**

Tahun	Belanja Operasi	Pertumbuhan	Persentase
2019	13.906.864.304		
2020	4.322.982.509	-9.583.881.795	-68,91
2021	16.056.427.633	11.733.445.124	271,42

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan anggaran belanja operasi untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar Rp 9.583.881.795 atau sebesar 68,91% dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan Dana Refocusing pada Dinas Sosial Kota Prabumulih yang di ambil dari Pagu Anggaran induk Tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 11.733.445.124 atau sebesar 271,42%. Selanjutnya untuk analisis trend realisasi anggaran belanja modal Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9**  
**Analisis Trend Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal**

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan	Persentase
2019	69.450.000		
2020	71.426.000	1.976.000	2,85
2021	33.500.000	-37.926.000	-53,10

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan anggaran belanja operasi untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 1.976.000 atau sebesar 2,85% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 37.926.000 atau sebesar 53,10%.

## 2. Variabel Non Keuangan

Penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Prabumulih berdasarkan non finansial didasarkan pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Perspektif Pelanggan

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Reliabilitas Perspektif Pelanggan**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0.910	9

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel non keuangan dalam hal ini perspektif pelanggan adalah reliabel.

Setelah diketahui bahwa butir kuisioner perspektif pelanggan dinyatakan valid dan reliabel, maka dilanjutkan dengan analisis hasil penyebaran kuisioner mengenai perspektif pelanggan. Adapun rekapitulasi kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan Kantor Dinas Sosial Kota Prabumulih dapat di lihat pada tabel berikut.

**b. Perspektif Proses Bisnis Internal**

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Reliabilitas Perspektif Proses Bisnis Internal**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0.970	23

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel non keuangan dalam hal ini perspektif proses bisnis internal adalah reliabel.

**c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Reliabilitas Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
0.943	14

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel non keuangan dalam hal ini perspektif proses bisnis internal adalah reliabel.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**1. Kesimpulan**

Pada Tahun 2019 penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil". Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2019 kesemuanya lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus (S).

Pada Tahun 2020 penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil". Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2020 pada belanja modal nilai anggaran sama dengan nilai realisasi, maka disebut impas (I) sedangkan pada belanja operasi nilai anggaran lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih Surplus.

Pada Tahun 2021 penilaian ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih terletak antara 81% - 100% dalam kategori "Sangat Berhasil". Kemudian berdasarkan klasifikasi selisih (varian) diketahui nilai anggaran Dinas Sosial Kota Prabumulih Tahun 2021 kesemuanya lebih besar dari pada nilai realisasinya, maka selisihnya disebut dengan selisih surplus.

Berdasarkan hal tersebut diketahui kinerja keuangan Kantor Dinas Sosial Kota Prabumulih berdasarkan penilaian balance scorecard semua sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penilaian secara finansial dari tahun 2019 – 2021 diperoleh hasil ketercapaian kegiatan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kota Prabumulih sudah sangat baik dengan klasifikasi selisih (varian) dalam kategori selisih surplus.

Kemudian pada penilaian secara non finansial dari segi perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kesemuanya dalam kategori baik.

## 2. Saran

- a. Diharapkan Dinas Sosial Kota Prabumulih lebih meningkatkan kecermatan dalam penyusunan kegiatan program yang dapat dilaksanakan secara riil agar tidak terdapat kegagalan program dalam pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Dinas Sosial Kota Prabumulih agar lebih memperhatikan hal-hal yang menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi sehingga penggunaan dana dapat sesuai dengan yang dianggarkan.
- c. Guna lebih meningkatkan kinerja keuangan dari sisi non finansial diharapkan Dinas Sosial Kota Prabumulih lebih meningkatkan kemampuan para pegawainya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan jabatan secara rutin dan tentunya didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tanra. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone. *Jurnal Riset Edisi IV Vol 3, No. 004* (2016)
- Astria. 2016. “Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. Skripsi Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eliza Dewi Susanto & Henny Murtini. 2015. Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Tengah. *AccountingAnalysisJournal* <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Fariz Syahidi. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar. *JIEB* (ISSN: 2442-4560) available online at: [ejournal.stiepancasetia.ac.id](http://ejournal.stiepancasetia.ac.id)
- Fatah. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Firdaus. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. *Artikel Ilmiah Universitas Pasir Pengaraian*
- Fitriani Saragih, dan Ilda Azilla Siregar. 2020. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora e-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020 | Medan - Sabtu, 26 Desember 2020.*
- Halim. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Lara Monika. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok. *Pareso Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hal. 98-111

- Mahdiyyah Haisir. 2017. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Earning Response Coefficient (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2013-2015”.Diaksesdari Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi [http://repository.radenintan.ac.id/1201/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1201/3/BAB_II.pdf).
- Marzully Nur dan Denies Priantinah. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Nominal, Volume 1, No. 1, 22-34.
- Oldison Santosa, dkk. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1512-1521
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Putra. 2017. Konsep-Konsep Dasar Akuntansi Keuangan”. Denpasar: Udayana University Press.
- Sugiyono. 2013. Metode penelitian kombinasi (mexid method). Bandung: Alfabeta
- Susanti, Raharjo & Oemar. 2017. Analisis rasio laporan keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) sebagai tolok ukur kinerja keuangan pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. 1–16.
- Susilowati. 2016. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012 – 2016. Jurnal Sekretari dan Manajemen. Volume 2 Nomor 2
- Umar. 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Umi Narimawati. 2017. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Agung Media.
- Undang Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah.